

THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND GENERAL ALLOCATION FUND ON CAPITAL EXPENDITURE IN DISTRICTS/CITIES IN WEST JAVA

Lionita Maharany¹, Gatot Wahyu Nugroho²

^{1&2}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: nita.maharany@gmail.com, gatotwahyunu2@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the effect of Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures in Districts/Cities in West Java in 2017-2020. The sampling technique in this study used a purposive sampling method. The population in this study consisted of 18 districts and 9 cities in West Java. With a research observation period of 4 years, namely 2017-2020. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis with the help of SPSS 25.0 for Windows. From the results of the research that has been done, the simultaneous regression test (Test F) shows that together Regional Original Income and General Allocation Funds have a significant positive effect on Capital Expenditures. The partial regression test (t test) shows that Regional Original Income has a significant positive effect on Capital Expenditures and General Allocation Funds has a significant positive effect on Capital Expenditures. The magnitude of the effect (R^2) by the two independent variables shows that the Regional Original Income and the General Allocation Fund have an effect of 62.1% on Capital Expenditures.

Keywords: *Regional Original Income; General Allocation Fund and Capital Expenditure*

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat. Dengan periode pengamatan penelitian selama 4 tahun, yaitu 2017-2020. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25.0 *for Windows*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, secara uji regresi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Secara uji regresi parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan (R^2) oleh kedua variabel independen menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan pengaruh sebesar 62,1% terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Seluruh wilayah Indonesia tidak pernah terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di setiap masing-masing daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6)). Sehingga dengan diberlakukannya peraturan tersebut pemerintah daerah memiliki hak keleluasaan dalam mengatur kebutuhan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut agar pemerintah memperhatikan pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (*good governance*) (Adisasmita, 2020, p. 143).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, semua itu berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat (www.kemenkeu.go.id, 2021). Maka dari itu belanja modal merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah daerah yang akan memberikan manfaat bagi perkembangan daerah dalam aktivitas pembangunan daerah.

Fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat ini dalam pengalokasian serta pelaksanaan belanja modal masih rendah dibawah 30%, dimana hal tersebut belum sesuai dengan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal pada APBD minimal 30% dari belanja daerah (Permendagri No. 27 Tahun 2013 Tentang APBD Pemerintah Daerah).

Belanja modal ini merupakan komponen pengeluaran daerah yang dapat menghasilkan sebuah pembangunan berupa infrastruktur, sarana maupun prasarana yang kemudian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dimana hal tersebut dapat menambah aset tetap suatu daerah yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi dua belas bulan atau satu tahun.

Belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih relatif terhadap belanja yang kurang produktif, sehingga belanja modal yang bersifat produktif masih belum mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Seharusnya pengeluaran untuk investasi publik/modal mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak pada anggaran tahun berjalan dan juga akan membebani anggaran tahun berikutnya (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2020). Rendahnya belanja modal dapat menghambat pembangunan berupa infrastruktur, sarana dan prasarana.

Tabel 1. Data Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2020

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Modal	Persentase
2017	75.202.526	16.214.186	22%
2018	86.626.098	14.699.684	17%
2019	93.883.878	17.103.768	18%
2020	89.920.615	12.397.224	14%

Sumber: Data Diolah

Pada tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pengalokasian atas terlaksananya belanja modal selama 4 tahun berturut-turut masih terbilang rendah dibawah 30%, belum sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Serapan belanja modal yang rendah berpotensi menimbulkan kerugian publik, karena belanja modal biasanya digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2019).

Dengan adanya fenomena tersebut Menteri keuangan Sri Mulyani mengaskan kembali bahwa batasan maksimal untuk belanja pegawai di setiap daerah sebesar 30%, yang kemudian dilanjut oleh Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam mengatur besaran minimum belanja infrastruktur termasuk belanja modal sebesar 40%. Hal tersebut diharapkan dapat mengingatkan kembali dan menjadi sebuah kesadaran bagi pemerintah daerah untuk lebih bijak lagi dalam mengoptimalkan pengaloaksiannya terhadap belanja modal agar perkembangan dan kemajuan daerah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Faktor yang mendukung terlaksananya belanja modal ialah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah merupakan perolehan pendapatan daerah yang dipungut secara langsung dari daerah itu sendiri yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya agar pelaksanaan belanja modal dalam pelayanan publik dapat

terlaksana sebaik mungkin serta dapat mengurangi ketergantungannya pemerintah daerah terhadap dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Peningkatan pada pelayanan publik diharapkan juga agar dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut (Sagara, 2021). Maka dengan cara menariknya para investor dapat terciptanya lapangan pekerjaan baru, sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik, dapat terjadi hubungan kemitraan dengan masyarakat serta membantu dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber langsung daerah itu sendiri.

Pada dasarnya kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda sehingga kemungkinan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah itu akan ada. Maka dengan adanya dana perimbangan yang salah satunya merupakan Dana Alokasi Umum dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen yang memiliki nilai tertinggi dari komponen dana perimbangan. Sehingga dengan tingginya perolehan Dana Alokasi Umum perlu dialokasikan secara optimal khususnya terhadap pengalokasian belanja modal. Agar pelaksanaan belanja modal dapat terlaksana sebaik mungkin.

Maka dari itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terdapat didalam komponen belanja modal pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengelola perolehan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian belanja modal. Pelaksanaan belanja modal yang bersifat produktif harus ditingkatkan semaksimal mungkin daripada belanja yang relatif kurang produktif. Karena dengan meningkatkan belanja modal maka manfaatnya akan secara langsung dirasakan masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Penelitian terdahulu seperti Abid et al., (2018) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Dalail et al., (2020) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Kemudian menurut Putri et al., (2021) menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Surakhman et al., (2019) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017-2020. Untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017-2020.

Berdasarkan hal tersebut, maka judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2020”.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Menurut Putra (2020, p. 282) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintahan dalam APBD yang dialokasikan untuk belanja yang menambah aset, diantaranya tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, jasa dan aset tetap lainnya yang tertuang dalam APBD. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2021, p. 69) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Putra (2020, p. 150) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan murni daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perolehan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum

Menurut Wijaya (2017, p. 47) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat *block grant* yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, dengan tujuan meratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5607

Daerah (APBD) pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Populasi penelitian ini ialah Kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2020. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling* didapatkan sampel sebanyak 108 sampel dalam penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasioanalisis variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran berdasarkan definisi dan indikator dari masing-masing variabel untuk mempermudah pengukuran saat pengolahan data. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu belanja modal, kemudian variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Variabel Dependen

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dengan manfaat lebih dari periode akuntansi dua belas bulan. Belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.

Penelitian ini belanja modal diukur dengan menggunakan $\ln$ total realisasi belanja modal. Penggunaan Logaritma Natural ($\ln$) dalam penelitian ini dimaksudkan agar mengurangi fluktuasi data yang berselisih cukup tinggi.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh secara murni dari daerah itu sendiri yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Alokasi umum merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN.

Penelitian ini PAD dan DAU diukur dengan menggunakan $\ln$ total realisasi PAD dan $\ln$ total realisasi DAU . Penggunaan Logaritma Natural ($\ln$) dalam penelitian ini dimaksudkan agar mengurangi fluktuasi data yang berselisih cukup tinggi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (bebas) dengan variabel dependen terikat (Ghozali, 2021, p. 145). Sebelum melakukan pengujian analisis regresi linear berganda maka peneliti perlu melakukan pengujian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Setelah uji asumsi dilakukan dan semua terdistribusi normal, maka dilanjutkan untuk melakukan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Uji Asumsi Klasik

Menurut Syafina & Harahap (2019, p. 61) uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk memastikan serta menentukan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021, p. 196) uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ serta melihat tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Sebuah variabel dapat dikatakan normal apabila nilai pengujian $\text{sig} > \alpha$, namun apabila nilai pengujian $\text{sig} < \alpha$ maka data tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai $\text{sig} = 0,200$ yang dimana $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,36696642
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,052
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021, p. 157) uji multikolinearitas ini bertujuan untuk apakah dalam variabel ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas yang dapat dilakukan dengan kriteria pengujian menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,518		,229	,820		
PAD	,268	,053	,375	,000	,666	1,501
DAU	,690	,100	,509	,000	,666	1,501

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa angka *tolerance* sebesar 0,666 yang dimana nilai tersebut 0,666 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,501 yang dimana nilai tersebut 1,501 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (independen).

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2021, p. 162) uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear atau data dalam penelitian ini terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Jika $dU < d < 4 - dU$ maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,788 ^a	,621	,613	,37044	2,085

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

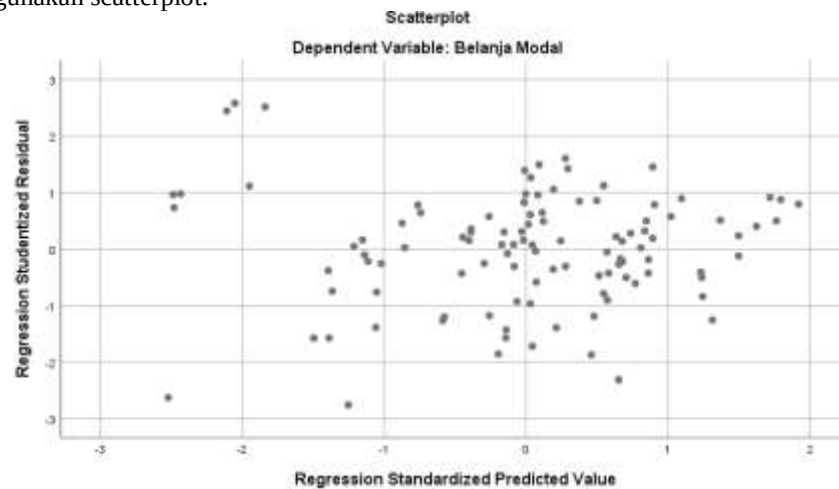
Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,085. Kemudian untuk mendapatkan nilai *du* dan *dl* dapat didapatkan dari tabel Durbin-Watson, yang dimana dalam penelitian ini terdapat dua variabel X dan jumlah data N = 108 sampel, sehingga diperoleh nilai *dl* sebesar 2,352 dan nilai *du* sebesar 2,276, dalam pengujian ini didapatkan hasil $1,724 < 2,085 < 2,352$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

5607

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2021, p. 178) uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi atau data terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan scatterplot.

**Gambar 1. Uji Heterokedastisitas**

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan gambar scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara menyeluruh di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Menurut Syafina & Harahap (2019, p. 75) uji hipotesis bertujuan untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari suatu pernyataan yang telah dibuat.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2021, p. 145) analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan atau seberapa besar pengaruh antara dua variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (depenen). Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b^1x^1 + b^2x^2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

a = Koefisien Konstanta

b = Koefisien Regresi

X¹ = PAD

X² = DAU

ε = error

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,518	2,264		,229
	PAD	,268	,053	,375	5,092
	DAU	,690	,100	,509	6,916

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari regresi linear berganda antara pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal sebagai berikut:

$$y = 0,518 + 0,268X_1 + 0,690X_2 + \varepsilon$$

Nilai α atau konstanta sebesar 0,518, maka dapat disimpulkan bahwa apabila besaran nilai variabel PAD dan DAU atau seluruh variabel independen dinyatakan 0, maka untuk nilai belanja modal sebesar 0,518.

Koefisien regresi X_1 atau variabel PAD sebesar 0,268, maka dapat disimpulkan bahwa apabila variabel PAD mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka berpengaruh meningkatkan variabel belanja modal sebesar 0,268.

Koefisien regresi X_2 atau variabel DAU sebesar 0,690, maka dapat disimpulkan bahwa apabila variabel DAU mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka berpengaruh meningkatkan variabel belanja modal sebesar 0,690.

Uji t

Menurut Ghazali (2021, p. 149) uji t atau parsial dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh signifikan pada satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 6. Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error		Beta	
1	(Constant)	,518	2,264		,229
	PAD	,268	,053	,375	,000
	DAU	,690	,100	,509	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel PAD diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,092 > 1,985$ dan nilai $sig\ t < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

DAU diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $6,916 > 1,985$ dan nilai $sig\ t < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Uji F

Menurut Ghazali (2021, p. 148) uji F atau simultan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang masukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	23,571	2	11,785	85,881
	Residual	14,409	105	,137	
	Total	37,980	107		

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel uji F diatas menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 85,881. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $85,881 > 3,082$ dan nilai $sig\ F < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2021, p. 147) uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data runtun waktu (*time series*) mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi, sedangkan untuk data silang (*crossection*) relatif lebih rendah.

Tabel 8. Tabel Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,621	,613	,37044

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel koefisien determinasi (R^2) diatas menunjukkan bahwa hasil dari uji koefisien determinasi sebesar 0,621 yaitu 62,1%. Artinya bahwa 62,1% belanja modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Kemudian sisanya 37,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain dari variabel dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dimana hal tersebut dibuktikan oleh pengujian uji t yang diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,092 > 1,985$ dan nilai $\text{sig } t < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya semakin tinggi PAD yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula pengalokasian terhadap pelaksanaan belanja modal, hasil tersebutpun sesuai dengan teori yang dijelaskan pada buku Putra (2020, p. 150) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD yang maksimal mampu meningkatkan kemampuan dalam urusan penyelenggaraan urusan daerah terutama pada pembiayaan pembangunan daerah.

Hasil penelitian inipun selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dalail et al (2020) dan Putri et al., (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya sehingga pemerintah daerah perlu menggali kembali sumber-sumber PAD agar terwujudnya pelaksanaan belanja modal yang dapat ditingkatkan kembali.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dibuktikan oleh pengujian uji t yang diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $6,916 > 1,985$ dan nilai $\text{sig } t < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah maka akan tinggi pula pengalokasian terhadap pelaksanaan belanja modal, hasil tersebutpun sesuai dengan teori yang dijelaskan pada buku Putra (2020, p. 85) yang menyatakan bahwa DAU dalam penggunaan perlu ditetapkan sesuai dengan capaian otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian inipun selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surakhman et al., (2019) dan Abid et al., (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Pembiayaan kebutuhan belanja daerah didominasi oleh Dana Alokasi Umum dikarenakan selalu didominasi oleh jumlah DAU yang diperoleh daerah tergolong cukup tinggi, sehingga DAU cukup berperan penting dalam membiayai kebutuhan belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Artinya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sama-sama dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap belanja modal sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Oktoria et al., (2022) yang menyatakan bahwa secara parsial maupun bersama-sama (simultan) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Tingginya Dana Alokasi Umum tidak selalu memberikan arti yang baik dikarenakan akan membuat pemerintah daerah menjadi bergantung besar terhadap dana yang diperoleh pemerintah pusat, sehingga menimbulkan ketidakmandiriannya suatu daerah dalam mendapatkan pendapatan secara murni. Jadi alangkah lebih baiknya Dana Alokasi Umum dapat diimbangi dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah.

PENUTUP

Berdasarkan tujuan dari sebuah penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017-2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017-2020. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,092 > 1,985$ dan nilai $\text{sig } t < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam membiayai pelaksanaan belanja modal.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017-2020. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $6,916 > 1,985$ dan nilai $\text{sig } t < 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berperan penting dalam membiayai pelaksanaan belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berkontribusi terhadap belanja modal sebesar 62,1%, sedangkan sisanya 37,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain dari variabel dalam penelitian ini.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu bagi pemerintah sebaiknya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sumber daerah yang berpotensi sehingga dapat meningkatkan pengalokasian terhadap belanja modal, kemudian dapat mengelola perolehan Dana Alokasi Umum sebaik mungkin agar pengalokasian belanja modal dapat perhatian khusus dan ditingkatkan kembali dan sebaiknya pemerintah daerah dapat memperhatikan pengalokasian belanja modal yang bersifat produktif daripada belanja yang relatif kurang produktif. Kemudian untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel dan variabel agar hasil penelitian yang didapatkan lebih luas. Variabel yang ditambahkan bisa berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abid, M., Rahayu, S., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal (Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015). *E-Proceeding of Management*, Vol. 5(No. 1), 753–759.
- Adisasmita, R. (2020). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dalail, A., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 14(No. 1), 178.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. (2020). *Belanja Daerah*. Kementerian Keuangan RI. www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada 05 Mei 2022
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2019). *Serapan APBD untuk Belanja Modal Rendah, Masyarakat Dirugikan*. www.kppod.org. Diakses pada 18 Mei 2022
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan RI*. KSAP.
- Menkeu Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur. (2021). www.kemenkeu.go.id. Diakses pada 05 Februari 2022
- Oktoriza, L. A., Widowati, A. I., & Surjawati. (2022). Factors Affecting Capital Expenditure Allocation In Central Java Province. *Jurnal Manajemen Dan Dinamika Bisnis*, Vol. 1(No. 1), 15–27.
- Permendagri No. 27 Tahun 2013. (2013). *APBD Pemerintah Daerah*. www.peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 05 Februari 2022
- Permendagri No. 77 Tahun 2020. (2020). *Pedoman Keuangan Daerah*. peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 04 Februari 2022
- Putra, W. (2020). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Jurnal*, Vol. 3(No. 2), 85–93.
- Sagara, E. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2015-2018*. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. *Kolegial*, Vol. 7(No. 2), 150–166.
- Syafina, L., & Harahap, N. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. (2014). *Pemerintah Daerah*. peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 02 Februari 2022
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. (2004). *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. peraturan.bpk.go.id. Diakses pada 02 Februari 2022
- Wijaya, H. (2017). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- www.djpk.kemenkeu.go.id